

DAFTAR PUSTAKA

- “Uni Lubis, Terganggu Kabut Asap, Singapura Gugat Perusahaan Indonesia, [https://www.rappler.com/world/singapura -gugat-perusahaan-indonesia-pembakar-hutan](https://www.rappler.com/world/singapura-gugat-perusahaan-indonesia-pembakar-hutan) , diakses 02 Februari 2023”.
- Abdul Khadir Muhammad, Hukum dan Politik Hukum, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2004), hal. 126
- Abdullah Kaspani, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No.39 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/Pid.SUS-LH/2020/PT JMB), Skripsi, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021)
- Ahmad Muzaki, Pengendalian Kebakaran Hutan Mengenai Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals, Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, (Semarang: Undip, 2021), Vol. 1, hal. 24
- Amirudin dan Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006), hal. 107
- Anak Agung Ayu Sisthayoni, “Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan”, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023.
- Apriliani Soegiarto, Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Laut dan PencemaranLaut (Jakarta: Lembaga Oeoadogi Nasional, LIPI, 2005), h.6.
- Burhan Bungin, penelitian kualitatif, (Jakarta, Kencana, 2015), hal. 27
- Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum LingkunganIndonesia, Bandung: Alumni,2001, h.125.
- David Weir & Mark Scarpiro, Lingkar Racun Pestisida (Jakarta: Sinar Harapan,1985)

- Didik Endro Purwoleksono, “Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan UU”,
Media Online Gagasan Hukum, 15 Desember 2008
- Fachmi Rasyid, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, Jurnal Lingkar
Widyaiswara, Vol. 1 No. 4 – 2014, hal. 47
- Hanafi, “Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengekar Narkotika
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Jurnal
Universitas Islam Madura (UIM) Pemekasan, Volume 1, Nomor 2,
September 2017, hlm. 33-34
- Hefni Effendi, Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan
Perairan (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h.195.
- Johanna Griselda Joy Saputro, “Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan
Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat”,
Jurnal Manajemen Bencana, Volume 7 Nomor 1, 2021. P. 27-36. Diakses
pada tanggal 23 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012:484
- lib.ui.ac.id, (diakses pada tanggal, 26 januari 2020 jam 10:15 WIB).
- Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.
- Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 195.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 59
- Monavia Ayu Rizaty, Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia (2016
2020), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/10/kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-turun-81-pada-2020>, di akses 02 Februari 2023”
- Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan
Lingkungan Hidup (Cet. II; Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), h. 69.

Ni Wayan Ella Apriyani, Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 3 – 2018, hal. 362

P. A. F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Penerbit Amrico, 2002), hal. 47

Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Pasal 1 Ayat 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Hutan dan Lahan

Pasal 108 Undang-Undang PPLH

Pasal 116 Ayat 2 Undang-Undang PPLH

Pasal 22 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU PPLH

Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (3) dan (4) UU Kehutanan

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Grub Jakarta Kencana, 2008), hal. 141

Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 51

Rachmad Rahardjo, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO), Skripsi, (Surabaya: UINSA, 2016)

Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab 1 Pasal 1 ayat 14.

Soedjono, Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri

Suhartono, “Konsepsi dasar dan harmonisasi norma hukum anggaran belanja negara”...,h. 41

- Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), h. 9
- Susiadi AS, Metode Penelitian, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), hal. 10
- Sutrisno Hadi, metodologi riserch, (Yogyakarta: Andy offset, 1997), hal. 9
- Syaifulloh Yophi Ardhiyanto, “Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan”, Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 3, 2020. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023.
- Tri Andrisman, 2009, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8
- Ulfah Utami, Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal, 70.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang cipta kerja Nomor 11 tahun 2020
- Yunia Rijayanti, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK), Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016)